

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap daerah diberi kekuasaan yang berguna untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya atau yang biasa disebut sebagai otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang diberikan kepada otonomi setiap daerah di dalamnya termasuk juga kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah yang kemudian wajib dipertanggungjawabkan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam wujud yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau yang biasa disingkat menjadi LKPD. (Mahsun et al., 2013) mendefinisikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai “akhir dari proses akuntansi keuangan daerah berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk dipakai pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan.” Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dimaksudkan untuk mewujudkan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Supaya dapat merealisasikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mengandung empat ciri kualitatif

laporan keuangan pemerintah yang tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, bisa dibandingkan, dan bisa dipahami. Kemudian, untuk meningkatkan kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), laporan keuangan tersebut diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit dan diberikan opini terkait dengan laporan keuangan tersebut. BPK akan memberikan opini, terkait kewajaran informasi keuangan yang ditampilkan. Hal itu berlandaskan empat tolak ukur, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, pengungkapan yang memadai (*adequate disclosures*), ketaatan terhadap perundang-undangan, dan keefisienan sistem pengendalian internal. Dalam (Jusup, 2014) disebutkan bahwa ada empat jenis opini yang diberikan oleh auditor, mencakupi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Guna mendapat pandangan opini WTP dari BPK, laporan keuangan perlu melewati beberapa tahap, tergantung pada reputasi pemerintah, otoritas yang berwenang, sistem pengelolaan keuangan yang baik, transparansi, dan lainnya. Selain daripada itu, syarat utama untuk memperoleh laporan keuangan wajar tanpa pengecualian adalah bahwa opini audit atas laporan keuangan adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam penyajian dan pengungkapan semua transaksi keuangan yang dilaksanakan dan semua aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengungkapan ini harus didukung oleh bukti-bukti valid yang relevan agar dapat diikuti dan dinilai oleh BPK. Sebab itu, supaya pelaporan keuangan pemerintah daerah mendapat pernyataan WTP, BPK pada prinsipnya memerlukan pendekatan

perbaikan dan pengelolaan keuangan yang benar-benar tepat sasaran.

Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta yang disampaikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir sudah berhasil mendapatkan opini yang baik yaitu WTP. Namun, pada kenyataannya pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta sendiri masih banyak terdapat isu-isu strategis yang sedang digarap oleh pemerintah dan masuk ke dalam rencana strategis BPPKAD Kota Surakarta pada periode 2016-2021 diantaranya yaitu modernisasi peralatan untuk pengelolaan pendapatan untuk mempermudah pelayanan pajak daerah kepada masyarakat; modernisasi peralatan untuk pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan pengawasan dengan ditunjang penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif; masih banyak aset daerah yg belum bersertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal karena tersebarnya obyek dan jenis kekayaan atau aset daerah dengan permasalahan yg kompleks; kurangnya kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan realisasi APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran kas yang telah ditetapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel; belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya *good governance*.

Adapun permasalahan diatas terjadi dikarenakan kurangnya kredibilitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi lain serta lemahnya sistem

pengendalian internal yang meliputi dari kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian internal. Selain itu mengenai teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang dan semakin dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini terutama dibutuhkan pada saat terjadinya wabah virus COVID-19 yang menuntut seluruh pegawai harus berperan aktif dan mampu menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, dukungan infrastruktur yang memadai dan kemampuan pegawai untuk berkembang merupakan hal yang penting untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi. Masalah lain yang sedang dihadapi yaitu terkait kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki, karena untuk menjamin kegiatan pemeriksaan yang berkualitas dan profesional maka pengembangan kompetensi harus terus dilaksanakan misalnya dengan pemerintah mengadakan kegiatan seperti *workshop*, pendidikan dan pelatihan, *focus group discussion* (FGD), seminar, dan knowledge transfer forum (KTF).

Penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah, 2018) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Malang. Penelitian (Ihsan, 2018) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) tidak berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan

satuan kerja perangkat daerah di Kota Palangkaraya. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap terciptanya kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palangkaraya. Penelitian (Toban, 2017) menyimpulkan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara.

Penelitian (Amalia & Retnani, 2020) mengatakan bahwa kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati et al., 2018) menunjukkan bahwa penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Suparwati, 2019) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Temanggung. Untuk variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Serta penelitian (Ningrum, 2019) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Magelang. Sedangkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Magelang.

Beberapa dari penelitian tersebut menghasilkan hasil dan kesimpulan yang berbeda-beda terhadap pengaruhnya, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali beberapa variabel independen dan variabel dependen pada penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda yaitu menggunakan BPPKAD Kota Surakarta sebagai objeknya. Alasan dipilihnya BPPKAD Kota Surakarta menjadi objek dalam penelitian ini yaitu dikarenakan di BPPKAD Kota Surakarta sendiri masih terdapat beberapa isu-isu strategis yang sedang digarap oleh pemerintah yang menjadi pokok pikiran dalam perbaikan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah hingga tahun 2021. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Surakarta”**.

1.2. Rumusan Masalah

Opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta yang disampaikan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir sudah berhasil mendapatkan opini yang baik yaitu WTP. Namun, pada kenyataannya pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Surakarta sendiri masih banyak terdapat isu-isu strategis yang sedang digarap oleh pemerintah dan masuk ke dalam rencana strategis BPPKAD Kota Surakarta pada periode 2016-2021 diantaranya yaitu modernisasi peralatan untuk pengelolaan pendapatan untuk mempermudah pelayanan pajak daerah kepada masyarakat; modernisasi peralatan untuk pengelolaan pendapatan,

pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk meningkatkan pengawasan dengan ditunjang penerapan sanksi yang efektif terhadap wajib pajak yang kurang kooperatif; masih banyak aset daerah yg belum bersertifikat dan belum dimanfaatkan secara optimal karena tersebarnya obyek dan jenis kekayaan atau aset daerah dengan permasalahan yg kompleks; kurangnya kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan realisasi APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran kas yang telah ditetapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel; belum optimalnya manajemen pengelolaan yaitu terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana kantor, sistem teknologi informasi, sistem dan mekanisme kerja, serta motivasi, sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dibahas di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Surakarta?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Surakarta?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji inkonsistensi dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh atau dampak variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan saran dari penelitian terdahulu, peneliti juga memakai daerah lain untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Penelitian ini memakai Badan Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kota Surakarta sebagai subjek penelitian.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh mengenai keuangan daerah, khususnya kualitas LKPD.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi BPPKAD Kota Surakarta terkait pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas LKPD dan mengatasi berbagai masalah yang ada di tahun-tahun selanjutnya.

3. Manfaat Kebijakan

Dalam hal ini pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.